

BAB III

**TERKAIT BADAN-BADAN PEMERINTAH YANG
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MENGENAI
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
DALAM ASPEK KEBUTUHAN EKONOMI**

**A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)**

**1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi termasuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dan anak. KPP-PA sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, maka sejak tahun 2002 melakukan Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), KemKes, KemSos dan Kepolisian (KATMAGATRIPOL) telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Rumah Sakit.⁴⁴

⁴⁴<http://p2tp2ajabar.org/> di akses 1 Oktober 2017 pukul 15:14 WIB

Tahun 2004 diperkuat dalam UU PKDRT dan Tahun 2007 dalam UU PTPPO untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu. Beberapa daerah telah membentuk dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan setelah nomenklatur KPP-PA, maka menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) P2TP2A juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, sehingga Pemda, Masyarakat dan Swasta mendukung pembentukan P2TP2A untuk memberdayakan kaum perempuan dan melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi. Dimana pada akhir-akhir ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (*trafficking*), dan lain-lain.

1. Visi Dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

VISI

Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan.

MISI

1. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.

2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Stuktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)



a. Jumlah Pengaduan yang diterima P2TP2A dalam 3 tahun terakhir

No	wilayah	Jumlah pengaduan
1	Sumatera dan Kepri	835
2	DKI Jakarta dan	5,501
3	Jabar Jatim, Jateng Jogja dan Bali	5,628
4	Nusa Tenggara Timur	121
5	Sulawesi dan Maluku	1,308
	Total/Jumlah Pelaporan di 5 wilayah.	13,393

Meski meningkatnya pengaduan dapat menjadi *indicator atas* meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap P2TP2A, namun meningkatnya pengaduan tidak bisa serta merta menjadi indikator kinerja P2TP2A dalam memberikan pelayanan yang dapat menjamin terpenuhinya hak korban. Kinerja P2TP2A ditentukan oleh kemampuannya untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi korban. Dari sudut pandang pengurus dan staf P2TP2A, 52% P2TP2A menyatakan telah memenuhi atau bahkan melebihi cakupan layanan minimal yang tercantum dalam SPM, sedangkan 48% cakupan layanannya masih kurang dari standar SPM. Sebagai contoh, sebagian besar P2TP2A di wilayah Sumatera telah memiliki cakupan layanan lebih dari SPM, namun hasil asesmen di Sumatera paling banyak ditemukan keluhan korban kekerasan yang sekedar mendapat layanan pencatat laporan/pengaduan dan tidak ada tindak lanjut dan pendampingan.

Dari sudut pandang korban, layanan yang paling dikenal korban adalah layanan pengaduan tetapi, korban tentu berharap agar kasusnya ditindak lanjuti. Sekedar mencatat kasus saja, merupakan pengabaian atas hak dan kebutuhan korban atas keadilan. Temuan asesmen menunjukkan bahwa P2TP2A yang kepengurusannya tidak bekerja efektif, maka pelayanannya cenderung terhambat. Indikator tersebut diantaranya kantor sering tutup, tidak bisa diakses di luar jam kantor, tidak ada petugas, sehingga pada akhirnya pelayanan pada korban sangat tergantung dengan jejaring pengada layanan maupun mitra kerja lain seperti rumah sakit dan kepolisian.

Kinerja P2TP2A sangat dipengaruhi juga oleh pendanaan dan terbatasnya anggaran untuk Bidang Pelayanan dan penanganan kasus kekerasan di masing-masing daerah. Dampak dari terbatasnya anggaran pada layanan P2TP2A adalah terbatasnya layanan dan kurang maksimalnya penjangkauan korban, belum terakomodasinya kebutuhan *shelter* atau rumah aman, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hasil asesmen menunjukkan bahwa kebutuhan korban atas rumah aman/*shelter* bagi perlindungan sementara perempuan korban kekerasan cukup tinggi. Kinerja pendampingan P2TP2A sangat dipengaruhi oleh kemampuan P2TP2A untuk menyediakan dan mengelola *shelter*/ rumah aman yang memenuhi rasa aman korban. Beberapa temuan dalam asesmen ini menunjukan bahwa pendampingan di rumah aman/*shelter* menjadi kunci bagi keberhasilan korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan keberhasilan memberdayakan dirinya. Keberhasilan P2TP2A dalam mengembangkan rumah aman yang inklusif dan terintegrasi dengan program-program pemberdayaandapat menjadi indikator atas

keberhasilan kinerja P2TP2A. Meski demikian, situasi *shelter* saat ini masih jauh dari layak. Meskipun secara fisik bangunan shelter/rumah aman ada, namun korban menilai sejauh ini keberadaan *shelter* P2TP2A masih merupakan tempat menyembunyikan korban dari pelaku. Banyak korban yang melarikan diri dari rumah aman karena petugas di rumah aman cenderung mengurung korban di ruangan dan petugas tidak mengizinkan korban keluar dari rumah aman/*shelter*. Situasi pembatasan ruang gerak korban secara sosial tanpa aktivitas memadai, menurut pengakuan korban juga menimbulkan gangguan psikologis baru bagi korban.

Kinerja P2TP2A juga diukur dengan bagaimana koordinasi dilakukan dengan jaringan kerja, baik jaringan masyarakat sipil seperti LSM, Organisasi Bantuan Hukum, Advokat, Psikolog maupun dengan jaringan pemerintah seperti institusi penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial dan lainnya. Koordinasi yang baik menyebabkan semua *stakeholder* P2TP2A yang terlibat dalam kepengurusan P2TP2A terlibat aktif dalam melakukan layanan dan koordinasi. Mekanisme koordinasi di beberapa wilayah dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi. Seperti di wilayah Sulawesi, koordinasi yang bersifat rutin dilaksanakan di P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Pangkep dan Kepulauan Buru. Di wilayah Jawa dan Bali, rata-rata sudah memiliki mekanisme koordinasi secara tertulis terutama P2TP2A di tingkat Provinsi. Mekanisme koordinasi tersebut dilakukan baik secara reguler/rutin maupun yang sifatnya insidental.

Namun meskipun telah memiliki mekanisme koordinasi secara tertulis dan telah dilaksanakan, pengurus atau petugas P2TP2A masih menganggap bahwa, ketentuan koordinasi masih belum dilaksanakan sepenuhnya, diantaranya karena

1. Banyak pengurus P2TP2A terutama dari perwakilan SKPD yang merangkap jabatan/ tugas dan fungsi
2. Adanya mutasi
3. Ego sektoral terutama dari SKPD-belum terintegrasinya program layanan dan dukungan
4. Ketiadaan ruang rapat untuk koordinasi.

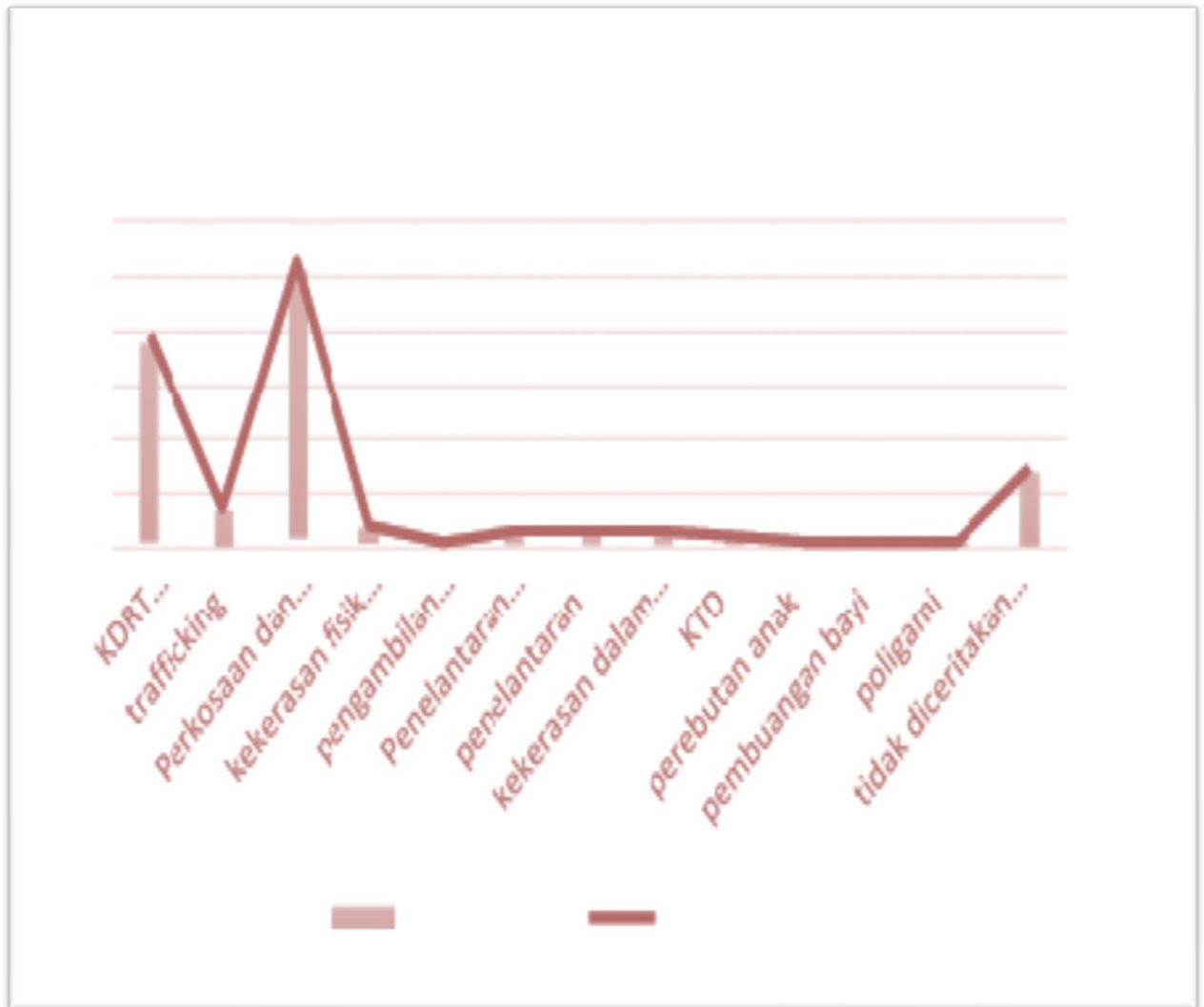
Untuk mengatasi persoalan di atas, di beberapa daerah, kendala koordinasi disiasati oleh P2TP2A dengan mendorong pembuatan *MoU* dengan lembaga-lembaga terkait. Tujuannya untuk memperjelas peran dan kewajiban para pihak dalam penanganan korban, serta memperkuat koordinasinya. Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh baik untuk kategori ini. Petugas di daerah ini dinilai oleh korban memiliki kapasitas untuk memberikan beragam layanan. Korban juga puas karena mereka dengan mudah dirujuk untuk mendapatkan layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban. Staf, petugas dan jaringan kerja P2TP2A tidak kebingungan dengan perannya masing-masing serta mekanisme koordinasi dan rujukan berjalan dengan baik.

b. Keberadaan P2TP2A Dalam Memperkuat Layanan Terhadap Korban

Asesmen ini berhasil mewawancarai 129 korban/orang tua korban yang mendapat layanan dari P2TP2A maupun mitra jejaringnya. Kasus terbanyak yang

diadukan oleh korban adalah perkosaan-pelecehan seksual dan pencabulan (40%), disusul dengan KDRT yang mencapai 29%, trafiking dan eksploitasi 5% dan kasus kekerasan lainnya 15%.

Jenis Kasus



- c. Berdasarkan Observasi Data Yang diperoleh dari Penelitian di Lapangan
- d. Berdasarkan Data Observasi Lapangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Memperoleh perlindungan hukum oleh P2TP2A

Tabel 1.

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat memperoleh	
2	Memperoleh	7
3	Cukup memperoleh	1
4	Kurang memperoleh	
5	Tidak memperoleh	1

Observasi digunakan catatan lapangan yang ditujukan kepada korban eksploitasi anak setelah di kelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Data yang terkumpul bahwa perlindungan yang di dapat oleh korban eksploitasi kebutuhan anak 7 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Memperoleh perlindungan hukum karena masalah yang di hadapi lebih mempermudah mereka untuk mendapatkan keamanan. 1 dari 10 korban berdasarkan data lapangan mereka cukup memperoleh. Dari 1 dari 10 korban mengatakan tidak memperoleh karena mentalitas anak tersebut susah untuk di atur oleh layanan P2TP2A.⁴⁵

⁴⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di akses 29 september 2018 pukul 15:30 WIB

Memperoleh pelayanan oleh P2TP2A

Tabel 2

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat memperoleh	
2	Memperoleh	6
3	Cukup memperoleh	2
4	Kurang memperoleh	1
5	Tidak memperoleh	1

Data yang terkumpul bahwa pelayanan yang di dapat oleh korban eksploitasi kebutuhan anak 6 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Memperoleh pelayanan hukum sikap ramah dan paham akan kondisi anak lebih berinteraksi dengan baik . 2 dari 10 korban berdasarkan data lapangan mereka cukup memperoleh.1 dari 10 korban mengatakan kurang memperoleh karena sebagian anak lebih memilih untuk kembali ke jalanan. 1 dari 10 korban mengatakan tidak memperoleh karena anak selalu takut dan tidak mau karna takut akan hal tidak menguntungkan bagi dirinya.

Memperoleh pelatihan oleh P2TP2A

Tabel 3

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat memperoleh	1
2	Memperoleh	4
3	Cukup memperoleh	3
4	Kurang memperoleh	
5	Tidak memperoleh	2

Data yang terkumpul bahwa pelayanan yang di dapat oleh korban eksploitasi pelatihan dari P2TP2A 1 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Sangat memperoleh pelatihan dari P2TP2A sikap ramah dan berinteraksi dengan baik kemudian mengajarkan suatu kegiatan guna mendapatkan ilmu yang lebih baik . 4 dari 10 korban berdasarkan data lapangan mereka memperoleh pelatihan. 3 dari 10 korban berdasarkan data lapangan mereka memperoleh pelatihan. 2 dari 10 korban mengatakan kurang memperoleh karena sebagian anak lebih memilih untuk kembali ke jalanan karena lebih menguntungkan.

Memperoleh pembinaan oleh P2TP2A

Tabel 4

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat memperoleh	
2	Memperoleh	4
3	Cukup memperoleh	4
4	Kurang memperoleh	
5	Tidak memperoleh	2

Data yang terkumpul bahwa Memperoleh pembinaan dari P2TP2A 4 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Memperoleh pembinaan dari P2TP2A sikap disiplin dan berinteraksi dengan baik kemudian memberikan arahan guna untuk memotivasi anak tumbuh berkembang dengan baik . 4 dari 10 korban berdasarkan data lapangan mereka cukup memperoleh pelatihan. 2 dari 10 korban mengatakan tidak memperoleh karena sebagian anak tidak biasa dengan sikap yang tegas dan karena lingkungan yang berpengaruh susah untuk di bina.

Kekerasan yang di alami mempengaruhi kehidupan sehari -hari

Tabel 5.

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat mempengaruhi	4
2	Mempengaruhi	2
3	Cukup mempengaruhi	3
4	Kurang mempengaruhi	
5	Tidak mempengaruhi	1

Data yang terkumpul mempengaruhi Kekerasan yang di alami kehidupan sehari-hari bahwa 4 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Mempengaruhi Kekerasan yang di alami kehidupan sehari-hari mereka karena keterpaksaan dan pemamfaatan terhadap korban sangat di rasakan terlihat dari perilaku anak yang menjadi penakut dan terbawa emosi karena memendam perasaan ketika iya sedang bekerja. 2 dari 10 korban mempengaruhi terhadap mental anak. 3 dari 10 korban cukup mempengaruhi. 1 dari 10 korban mengatakan tidak mempengaruhi karena sebagian anak sudah terbiasa akan kekerasan .

Keterpaksaan bekerja yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari

Tabel 6

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat mempengaruhi	5
2	Mempengaruhi	4
3	Cukup mempengaruhi	
4	Kurang mempengaruhi	
5	Tidak mempengaruhi	1

Data yang terkumpul Keterpaksaan bekerja yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 4 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Mempengaruhi Kekerasan yang di alami anak. Mereka karena keterpaksaan dan pemamfaatan terhadap korban sangat di rasakan terlihat dari perilaku anak yang menjadi penakut dan terbawa emosi karena memendam perasaan ketika iya sedang bekerja. 2 dari 10 korban mempengaruhi terhadap mental anak. 3 dari 10 korban cukup mempengaruhi. 1 dari 10 korban mengatakan tidak mempengaruhi karena sebagian anak sudah terbiasa akan kekerasan.

Kebutuhan anak setelah adanya pembinaan dan pelatihan

Tabel 7

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat baik	
2	Baik	5
3	Cukup baik	2
4	Kurang baik	1
5	Tidak baik	2

Data yang terkumpul Kebutuhan anak setelah adanya pembinaan dan pelatihan. 5 dari 10 korban berdasarkan data lapangan. Baik dalam melakukan pembinaan dan pelatihan oleh pengajar. 2 dari 10 korban cukup baik pembinaan dan pelatihan. 1 dari 10 korban kurang baik karena susah untuk di atur dan menolak untuk di bina. 2 dari 10 korban mengatakan tidak baik alasannya karena tidak ingin belajar apapun.

Kebutuhan sekolah

Tabel 8

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat baik	
2	Baik	5
3	Cukup baik	3
4	Kurang baik	1
5	Tidak baik	1

Data yang terkumpul Kebutuhan sekolah untuk anak setelah adanya pembinaan dan pelatihan. 5 dari 10 korban berdasarkan data lapangan bahwa P2TP2A telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk selalu mendukung anak untuk bersekolah dan demi kenyamanan masa depan anak. 3 dari 10 korban cukup baik . 1 dari 10 korban kurang baik karena tidak berkeinginan dan bosan untuk bersekolah. 1 dari 10 korban mengatakan tidak baik karena apapun tidak bisa merubah dirinya.

Sikap terhadap lingkungan

Tabel 9

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat baik	1
2	Baik	4
3	Cukup baik	4
4	Kurang baik	
5	Tidak baik	1

Data yang terkumpul sikap terhadap lingkungan anak setelah adanya pembinaan dan pelatihan. 1 dari 10 korban berdasarkan data lapangan bahwa anak sangat senang dan mengurangi rasa takut dan siap berinteraksi dengan masyarakat .4 dari 10 korban baik . 4 dari 10 korban cukup baik karena lebih nyaman setelah adanya penanggulangan terhadap anak.1 dari 10 korban mengatakan tidak baik karena mentalitas anak sejauh ini masih belum optimal karena rasa canggung terhadap lingkungannya.

Setelah pembinaan dan pelatihan

Tabel 10

No	Jawaban korban eksploitasi	Jumlah
1	Sangat baik	1
2	Baik	7
3	Cukup baik	1
4	Kurang baik	
5	Tidak baik	1

Data yang terkumpul setelah adanya pembinaan dan pelatihan. 1 dari 10 korban berdasarkan data lapangan bahwa korban sangat baik dengan perkembangan dirinya sekarang. 7 dari 10 korban mengatakan lebih tenang dan nyaman. 1 dari 10 cukup baik program yang di laksanakan oleh P2TP2A. 1 dari 10 korban mengatakan tidak baik karena tidak mengerti aturan yang di berikan P2TP2A. 3 dari 10 korban cukup baik . 1 dari 10 korban kurang baik karena tidak berkeinginan dan bosan untuk bersekolah. 1 dari 10 korban mengatakan tidak baik karena apapun tidak bisa merubah dirinya.

B. Polrestabes Bandung

Bangunan Gedung Mapolwiltabes Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang Belanda bernama *K.F. Hole* sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray,

Bayongbong, Garut. Di sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti *Abdulharis Nasution*, *Otto Iskandardinata* dan yang lainnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Polrestabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsek-polsek jajaran seperti saat ini. Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut, berdiri dengan nama "Komtabes-86 Bandung" dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu, terdiri dari:

1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
3. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi "Poltabes Bandung" dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta, yaitu : Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojong Loa, Astana Anyar, Andir, Cicendo, Sukajadi, Sukasari, Cidadap, Cihapit, Coblong, Regol, Lengkong, Batununggal, Kiaracondong dan Cibeunying.

Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara professional , transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi;

Struktur Organisasi Polrestabes Bandung

Berdasarkan dari data yang diperoleh Polrestabes Bandung jumlah pekerja seks komersial dibawah usia 18 tahun sekitar kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan kasus yakni Bandung 1.255 eksploitasi seksual.⁴⁶ Dengan data yang di peroleh bahwa Bandung sangat mengkhawatirkan menurut pernyataan Asep Komara bahwa anak-anak menjadi sasaran untuk mudah di mamfaatkan dengan modus-modus yang mudah untuk dilakukan oleh tersangka eksploitasi.

⁴⁶ <http://polrestabes-bandung.or.id> di akses 1 Oktober 2017 pukul 17:35 WIB

Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat, 2016.⁴⁷

Kabupaten/Kota Regency/City		Anak Terlantar/ Neglected Children	Lansia/ Jompo/ Decrepit	Anak Nakal/ Naughty Children	Korban Narkotika / Drug Abuser	Cacat/ Handicape d Person	Gelandangan & Pengemis/Loiter er & Beggar	Tuna Susila/ Prostitute	Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan/ Children Womens & Victim of Hardness (Jiwa/Persons)	Orang Dengan HIV/AIDS/ HIV Patient (Jiwa/Persons)	Bekas Narapidana/ Eksprisoner (Jiwa/Persons)
Kabupaten/Regency											
1.	Bogor	6.999	8.878	133	43	8.387	711	372	7	1.635	458
2.	Sukabumi	61.239	14.223	165	252	11.727	1.361	164	68	769	68
3.	Cianjur	1.678	1.264	43	247	5.077	587	258	-	661	645
4.	Bandung	7.625	36.044	72	402	6.770	779	390	26	1.145	679
5.	Garut	71	80.686	26	1.642	8.275	371	173	58	660	815
6.	Tasikmalaya	629	8.200	28	-	9.586	323	64	53	463	271
7.	Ciamis	851	1.430	34	33	4.522	33	45	-	416	225
8.	Kuningan	4.052	4.349	60	56	5.793	86	31	-	268	221
9.	Cirebon	889	11.914	333	129	10.567	800	193	-	1.339	482
10.	Majalengka	5.441	21.751	509	164	7.570	23	116	6	312	162
11.	Sumedang	728	5.214	96	87	3.149	39	122	2	357	224
12.	Indramayu	13.940	31.990	77	41	1.980	4.154	1.582	26	1.421	791
13.	Subang	7.134	23.278	52	78	9.236	136	139	4	417	156
14.	Purwakarta	495	960	7	58	2.897	133	371	-	204	120
15.	Karawang	5.231	19.251	660	1.731	6.288	270	313	-	611	164
16.	Bekasi	4.393	54	30	-	3.010	1.385	541	-	1.698	2.130
17.	Bandung Barat	345	6.357	20	338	6.134	274	61	-	532	130
18.	Pangandaran	76	4.394	5	-	1.684	10	14	-	-	283
Kota/City											
1.	Bogor	1.128	644	9	112	795	186	79	-	699	77
2.	Sukabumi	345	1.575	49	33	1.096	84	39	-	152	78
3.	Bandung	2.800	2.108	19	-	8.038	263	52	-	1.357	189
4.	Cirebon	1.200	1.803	50	111	1.097	66	38	6	572	19
5.	Bekasi	681	1.204	34	216	-	62	18	-	527	32
6.	Depok	205	23	8	27	1.050	94	5	-	1.124	187
7.	Cimahi	670	3.435	35	112	1.434	1	4	4	499	15
8.	Tasikmalaya	6.290	3.125	22	4	1.200	43	67	-	228	2.709
9.	Banjar	652	4.418	16	19	1.253	8	20	-	40	44
Jawa Barat		135.787	298.572	2.592	5.935	128.615	12.282	5.271	260	18.106	11.374

C. Hasil wawancara

1. Hasil Wawancara (P2TP2A) dengan Hj. Nenny Nuraeni, SH CN.

Bagaimanakah menurut anda faktor-faktor mengenai persoalan eksploitasi yang di tanggap oleh P2TP2A?

⁴⁷ <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/405/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016.html> di akses 27 november 2018 pukul 14.03 WIB

Faktor ekonomi yang dimaksud para pelaku disini adalah bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap kemudian Masalah yang paling utama dihadapi oleh lapisan bawah seperti pihak-pihak yang melakukan eksploitasi ini adalah masalah ekonomi atau keuangan.

Berdasarkan data yang kami dapat Kehidupan di kota yang sangat keras dan persaingannya yang kuat membuat orang-orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan yang berat di kota-kota menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri.

Kemudian Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola -pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Apakah secara tidak langsung mereka menjadi terpengaruh oleh lingkungan ?

Menurut saya iya akan hal itu karna mereka membiarkan anak-anaknya mencari uang dijalanan karena tetangga-tetangganya juga

melakukan hal yang sama. Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis ataupun bekerja dijalanan, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat seorang anak-anak yang masih dibawah umur meminta-minta dijalanan.

”Apalagi kalau hari hujan seperti sekarang ini, Mbak. Penghasilan sehari bakalan lebih banyak dari biasanya” kata salah seorang ibu anak jalanan yang kami temui”.

Bagaimanakah menurut P2TP2A menanggapi kasus eksploitasi anak berdasarkan faktor sosial ?

Orangtua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

Para orangtua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas social itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun kejalanan membantu mencari nafkah. Tidak bisa kita hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat

program-program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

Apakah proses penerapan hukum terhadap eksploitasi anak dalam aspek kebutuhan ekonomi ini secara praktiknya sudah terealisasikan dengan baik atau belum ?

Sebenarnya sudah terealisasikan akan tetapi penerapan hukum mengenai masalah perlindungan anak, masalah tersebut kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut tidak mungkin dapat diatasi secara perorangan, tetapi dalam penyelesaiannya harus secara bersama-sama, karena dalam hal ini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Lalu bagaimanakah menurut anda solusi dari eksploitasi anak ?

Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua.

Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan atau memamfaatkan anak di bawah umur untuk bekerja kemudian anak di lingkungan sekitar penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.

Aparat hukum seharusnya dapat lebih peka anak pada setiap proses penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak .

Memperbaiki seluruh pelayanan publik baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa. Memberikan pendidikan nonformal. Mengadakan keterampilan bagi anak, pembiayaan atau penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak.⁴⁸

2. Hasil wawancara dengan Anak Jalanan yang berada di Jalan Laswi-Gatsu Kota Bandung.

Apa yang anda rasakan ketika anak anda rela melakukan pekerjaan di jalanan ?

“Karna saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyuruh anak saya untuk bekerja, toh sama-sama nyari duit.”⁴⁹ cemas sih ada ya mba rista, takut anak saya kecelakaan keserempet motor atau mobil tapi, itu resiko.

Saya pun kadang mau bekerja, tapi duitnya lebih untung ngemis dan di bantu anak saya kerja di jalanan.

lagian mau nyari kerja dan mempercaya saya ya siapa?

⁴⁸ Lokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di akses 19 september 2018 pukul 15:30 WIB

⁴⁹ Lokasi perempatan di Jalan Laswi-Gatsu Bandung 27 November 2018 pukul 13:12 WIB

ya, saya gembel pengemis gini mana mau yang memperkerjakan saya.
mengapa anda pesimis bu, bahwa saya tidak akan di pekerjakan ?

Ya, ga ragu gimana toh mba rista, saya saja miskin tidur di mana aja.
bisa makan aja sudah bersyukur berkat anak saya yang kerja. tapi saya
pernah di tawarkan bekerja sama RW di tempat saya biasa tinggal
sebagai tukang rumput cuman saya gamau mba ris, karna sedikit
duitnya.

Jadi, Menurut Ibu Anisa Putri, beliau menyuruh anaknya untuk
mengemis di jalanan agar bisa membantu mendapatkan uang supaya
bisa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Karena anaknya berhenti
sekolah, Ibu Anisa selalu menyuruh anaknya yang masih berusia 9 tahun
agar pergi mengemis dari pukul 8 sampai pukul 4 sore.

Hasil mengemis anaknya di berikan kepada Ibu Anisa setiap
beberapa jam sekali. Ibu Anisa dan anaknya selalu melakukan kegiatan
tersebut setiap hari dan bahkan disaat hari libur tiba, Ibu Anisa dan
anaknya bisa mendapatkan uang lebih banyak dari hari biasanya.

Wawancara dengan Rodi Ruhiat anak Ibu Anisa Putri.

De, apa yang kamu rasakan ketika kerja di jalanan ?

“Ya cape, harus panas-panasan di tambah lagi kalo udah hujan
ya ga enak badan. Kadang aku suka ikut temen buat kerja di pasar ya
bantuin gitu lumayan, buat tambahan biar bisa makan enak hehe”.

Emang kamu tidak ingin de, untuk lanjutin sekolah ?

“Aku sih ingin untuk lanjutin sekolah, malah cita-cita saya ingin jadi presiden biar temen-temen aku pada bisa sekolah terus hidupnya bisa cukup, ga perlu panas-panasan.” tapi temen aku juga ada yang sekolah juga. cuman sering bolos katanya mending nyari duit, dari pada di sekolah. bosen.

Kamu pernah tidak de di tawarin sekolah lagi, sama dinas sosial ?

“Pernah, cuman aku gamau kasian ibu aku entar makan apa, lagian saya senang juga hidup di jalanan ada temen yang sama kerja kaya aku minta-minta, kadang ngamen kalo enggak bantuin di pasar lumayan uangnya si bos nya juga baik.”

“Terkadang aku suka minder sih, liat anak yang lain bisa sekolah orangtuanya kerja, kemudian ga perlu susah-susah aku nyari duit.”

3. Hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Unpas Leni Widi Mulyani, S.H., M.H. merupakan salah satu dosen mengajar Hukum Pidana Anak.

Bagaimanakah tanggapan anda mengenai eksploitasi anak yang di sebabkan kebutuhan ekonomi ?

Kemamfaatan yang tidak di nikmati oleh pelaku tapi oleh pihak lain dan kemudian dijadikan komersil dan hal tersebut bisa di katakan bentuk eksploitasi. Sebenarnya anak itu tidak di peruntukan untuk bekerja dengan alasan apapun tidak boleh bekerja tapi sayangnya orang tua membiarkan anak nya untuk bekerja untuk mencari nafkah bahkan

meminta mereka untuk bekerja dan penghasilan oleh anak tersebut uangnya di kembalikan kepada orang tuanya. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak anak bahwa kita tidak boleh menggunakan kemiskinan bukan alasan pembenar dia bisa eksploitasi anak karena sekarang banyak bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin hanya bagaimana kita bergerak saja. Menurut salah satu pihak yang bersalah adalah bisa orang tuanya atau orang lain yang mengambil keuntungan karena anak kecil tersebut tidak memikirkan pekerjaan kecuali ada paksaan dari pihak lain.

Bagaimanakah tanggapan anda mengenai Faktor-faktor yang mendorong seorang anak untuk bekerja di jalanan?

Ada faktor dari dalam bisa dari anak tersebut ataupun faktor dari luar. faktor dari dalam mungkin anak tersebut melihat kondisi dirinya dan orangtua untuk mendorong dirinya untuk bekerja karena simpati terhadap orang tuanya, ataupun berkeinginan berpenghasilan sendiri dari hasil bekerja tersebut tanpa tidak tahu sekuensi pekerjaan yang ia lakukan apa. Atau pun faktor dari luar adanya desakan dari orang tua atau teman sebayanya dalam batin yang terpaksa untuk bekerja bisa terpaksa atau terbiasa hal yang paling berbahaya adalah terbiasa contohnya jika anak tersebut di layani oleh pihak dinas sosial dengan kurun waktu dua minggu anak tersebut kembali lagi ke jalanan karna mendapatkan sesuatu dengan gampang.

Bagaimanakah tanggapan anda mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Adanya pelanggaran terhadap hak anak, relevansinya bahwa anak tidak di perbolehkan untuk bekerja, ketika anak bekerja jelas disitu adanya pelanggaran hak anak karna di jalan itu bahwa anak begitu rentan untuk bekerja dan tidak ada perlindungan.

Bagaimanakah tanggapan anda mengenai implementasi perlindungan hukum yang di buat pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dari korban eksploitasi secara ekonomi ?

Mungkin untuk sisi praktek sudah di lakukan oleh dinas sosial dengan program-program yang bisa di buka akan tetapi kembali lagi kepada metalitas masyarakat itu sendiri. Sebenarnya pemerintah itu belum optimal melakukan program tersebut, akan tetapi usaha yang dilakukan sudah ada. Terutama melindungi anak-anak yang tereksplorasi oleh kebutuhan ekonomi dengan adanya dinas sosial dan memeberikan pelatihan dan sebagainya. Kemudian memberikan program gratis untuk sekolah. Tapi kembali lagi kepada anak tersebut jika tidak mau maka program tersebut susah untuk di lakukan maka dari sinilah peran masyarakat melakukan sosialisasikan agar terealisasi program pemerintah tersebut.

Kemudian Kendala dan hambatan apa sajakah untuk menjalankannya dan bagaimanakah upaya menanggulangnya ?

Hambatan nya dari anak itu sendiri sudah ada program pemerintah untuk pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, akan tetapi tidak didukung oleh kemauan anak tersebut atau orang tuanya sendiri tidak menyertakan anak nya dalam program tersebut.⁵⁰

1. Hasil wawancara PT. GRAND TEXTILE INDUSTRY dengan Bapak Casdi jabatan HRD

1. Apakah perusahaan anda termasuk ketat dalam aturan mengenai larangan pegawai di bawah umur ?

Bahwa di perusahaan ini tidak ada atau tidak di perbolehkan pegawai di bawah umur. Di karenakan bahwa perusahaan kami telah ada aturan dan syarat mengenai kriteria memilih pegawai untuk bergabung dengan perusahaan kami. Dengan begitu kami telah melakukan selektif dalam memilih karyawan dan mengetahui peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan maka dengan begitu kami sangat hati-hati dalam memilih karyawan.

2. Bagaimakah pendapat anda tentang maraknya mempekerjakan karyawan di bawah umur ?

Mungkin paling signifikan dengan persoalan ekonomi dengan kebutuhan banyak. maka keinginan kerja karena butuh jadi terpaksa meninggalkan rasa kemauan melanjutkan pendidikan. Maka saran saya pemerintah memberikan solusi untuk masyarakat untuk membangun lebih

⁵⁰ Fakultas Hukum Universitas Pasundan 20 september 2018 pukul 15:30 WIB

baik lagi ekonomi untuk masyarakat sehingga anak-anak bisa meraih mimpi yang seharusnya iya terpenuhi.

2. Lingkungan masyarakat di daerah kiaracondong Jl Lebak Kelurahan Kebonwaru Kecamatan batununggal RT 03 RW 05. Wawancara dengan RT setempat dengan Bapak Asep Hasdi

Apakah di lingkungan masyarakat anda ada memperkerjakan di bawah umur ?

Menyikapi pertanyaan anda di lingkungan kami khusus nya daerah kiaracondong. Tidak ada yang memperkerjakan dibawah umur, karena anak-anak disini lebih menyukai kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti Karangtaruna sebagai wadah untuk melakukan kegiatan kreatif. Dengan begitu banyak hal yang bisa di lakukan dan menjauh kan anak dari kegiatan yang negatif.

Apakah dalam lingkungan anda ada beberapa anak yang bekerja sebagai seks komersial ?

Di lingkungan kami dan yang saya ketahui tidak ada, karena sangat meresahkan jika ada dan terjadi di lingkungan kami. Tindakan yang kami buat jika ada hal itu terjadi memberikan solusi untuk salah satu warga kami. Agar tidak melakukan berhubungan intim di luar agama apalagi seks komersial sangat tidak moral.

3. Berdasarkan wawancara pendapat Psikolog dengan Ibu Tresna Suci Lestari S.Psi.

1. Apa yang menyebabkan kondisi jiwa anak menjadi kacau karena ekonomi?

Mungkin kita akan menghayati begitu banyak perasaan negatif takut, bingung, kesepian, sedih, marah, dan menyesali diri, merasa bodoh, tak berdaya, mungkin juga sangat marah dan benci kepada orangtua yang telah berlaku tidak adil.

Kita juga akan merasa sangat malu karena orangtua melakukan hal begitu buruk dan karena kita diperlakukan demikian buruk Trauma psikologis suatu kejadian yang menghadapkan kita pada ancaman genting yang *overwhelming*, berdampak pada tergoncangnya keseimbangan. Ketika itu terjadi, kapasitas menyelesaikan masalah dari otak kehilangan kemampuan mengendalikan situasi.

Kekagetan dan ketakutannya dapat sangat melumpuhkan, apalagi bila dibarengi sakit fisik. Luka batin akibat perlakuan orang terdekat sering lebih menghancurkan.

Dengan kasus anak yang terjadi pada saat ini mengenai korban eksploitasi kebutuhan ekonomi. Bahwa anak sangat kehilangan kepercayaan dirinya karena adanya tekanan kemudian faktor lingkungan yang tidak begitu mendukung ketidak acuhan masyarakat terhadap anak mempengaruhi jiwa anak. Maka saran saya orang tua, lingkungan masyarakat maupun sekolah harus mendorong anak dan mendukung kegiatan anak dengan tutur kata yang baik sedikit demi sedikit akan memahami kemauan anak tersebut. Dan mencoba pendekatan emosional dengan merangkul anak tersebut membuka hatinya untuk berbicara tentang kondisinya.

2. Apa pendapat anda mengenai anak zaman sekarang yang mencoba pergaulan bebas ?

Tolak ukur usia menjadi pengaruh bagi dirinya keinginan untuk mengetahui yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi pertimbangan dirinya sendiri memilih positif atau negatif. Karena fase remaja biasanya keinginan untuk mengetahui sangat lah tinggi apalagi di dukung oleh lingkungannya yang buruk menjadi candu dan terbiasa melakukan hal negatif.

Maka saran saya perbanyak pengetahuan tentang pengendalian diri keinginan untuk memperoleh apapun. Sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan suatu keinginan terlebih mecari tahu dulu.